

ABSTRAK

Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih memiliki wilayah tanah ulayat dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi hak ulayat yang dimiliki Suku Sakai semakin lama semakin melemah. Hal

ini disebabkan oleh pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak investor. Akibatnya luas tanah ulayat yang dimiliki oleh suku sakai semakin lama semakin mengalami penurunan. Pengambilalihan tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak investor menyebabkan masyarakat Suku Sakai sulit dalam memanfaatkan tanah dan hutan yang mereka miliki. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi masyarakat Suku Sakai melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat Suku Sakai.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dari penelitian ini diperoleh penulis dari penilitan kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data penelitian didapatkan melalui data primer dan didukung melalui data sekunder dan tersier. Kemudian data tersebut dianalisa dan disimpulkan melalui metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Suku Sakai mulai mengalami pengikisan dan pelemahan. Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diharapkan mampu meminimalisir pengikisan terhadap wilayah hak ulayat masyarakat Suku Sakai. Namun perlu adanya peraturan khusus yang harus disahkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Suku Sakai guna menjaga eksistensi hak ulayat yang mereka miliki dan mencegah terjadinya konflik kepemilikan lahan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Eksistensi Hak Ulayat, Suku Sakai

ABSTRACT

The Sakai Tribe community in Bengkalis Regency, Riau Province is one of the customary law communities who still have customary land areas. However, the customary rights owned by the Sakai Tribe are getting weaker and weaker. This is due to the takeover and control by the investors. As a result, the area of customary land owned by the Sakai tribe is increasingly decreasing. The takeover of ulayat land by investors makes it difficult for the Sakai people to take advantage of the land and forests they have. Based on this, the economic development of the Sakai people weakens in meeting their daily needs. Therefore, this study aims to determine how the recognition and protection of the existence of customary rights of the Sakai Tribe community.

This research is descriptive analytical using a normative juridical approach. Data collection techniques used are document studies, interviews and documentation. While the research data sources were obtained through primary data and supported by secondary and tertiary data. Then the data is analyzed and concluded through qualitative methods.

Based on the results of the study, it was revealed that the customary rights owned by the Sakai Tribe community began to experience erosion and weakening. With the implementation of Regional Regulation of Riau Province Number 10 of 2015 concerning Ulayat Land and its Utilization, it is expected to be able to minimize the erosion of the customary rights area of the Sakai Tribe community. However, there needs to be a special regulation that must be ratified by the Bengkalis Regency Government which specifically regulates the protection of ulayat rights owned by the Sakai Tribe community in order to maintain the existence of their ulayat rights and prevent land ownership conflicts.

Keywords: Customary Law, Existence of Ulayat Rights, Sakai Tribe